

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi merupakan suatu proses adanya ketergantungan baik antar negara maupun antar manusia seluruh dunia, sehingga batas-batas antar wilayah menjadi semakin pudar. Salah satu bentuk interaksi yang muncul akibat adanya globalisasi adalah perdagangan internasional. Pembelian dan penjualan barang dan jasa yang terjadi antar negara saat ini dikenal sebagai perdagangan internasional. Tujuan dilakukannya perdagangan internasional ini oleh suatu negara adalah untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dari negara lain. Perdagangan internasional kemudian dijadikan faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) bagi banyak negara.¹ Oleh karena itu penting bagi suatu negara untuk mulai bekerja sama dalam perdagangan dengan menandatangani perjanjian perdagangan bebas.

Perdagangan bebas merupakan kegiatan pertukaran barang, modal, dan tenaga kerja antara satu negara dengan negara lain tanpa pengenaan tarif atau hambatan non tarif lainnya. Melalui perdagangan bebas ini setiap negara memiliki kesempatan untuk berspesialisasi dalam produksi barang dan jasa sesuai dengan keunggulan sumber daya negaranya masing-masing. Adanya spesialisasi ini memungkinkan suatu negara untuk dapat memanfaatkan sumber dayanya secara efektif dengan demikian hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi

¹ Wahono Diphayana, *Perdagangan Internasional*, Edisi 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)

negaranya.² Maka dari itu, saat ini banyak negara di dunia terlibat dalam upaya kerja sama perdagangan bebas.

Australia adalah salah satu negara yang melakukan perdagangan bebas. Perdagangan bebas yang dilakukan oleh Australia merupakan upaya untuk pemanfaatan potensi sumber daya alamnya yang berlimpah. Australia sendiri dikenal sebagai negara eksportir yang mengandalkan komoditas seperti, batu-bara, bijih besi, gas alam, emas, aluminium, minyak bumi, bijih tembaga, daging hewan sapi, wol, gandum, dan meslin.³ Berdasarkan potensi yang ada tersebut, maka dari itu menjalin hubungan kerja sama perdagangan bebas baik bilateral maupun multilateral menjadi sangat penting bagi Australia. Adapun negara yang telah menjalin kerja sama perdagangan bebas dengan Australia seperti Thailand, Jerman, Inggris, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Jepang, Amerika Serikat dan Tiongkok. Negara-negara ini masuk ke dalam sepuluh mitra dagang terbesar Australia.⁴ Dari banyaknya negara yang telah menjalin kerja sama perdagangan bebas dengan Australia, Negara Tiongkok adalah mitra dagang utama Australia.

Sejak tahun 2009, peningkatan kerja sama perdagangan Australia dan Tiongkok telah membawa Tiongkok sebagai mitra dagang utama Australia. Tiongkok mampu menggeser posisi Amerika Serikat, Jepang dan Inggris dalam konteks negara tujuan ekspor Australia.⁵ Meskipun demikian, Australia dan Tiongkok baru berhasil meresmikan kerja sama perdagangan bebas mereka pada

² Atih Rohaeti Dariah, "Perdagangan Bebas : Idealisme Dan Realitas," *Mimbar* 21, no. 1 (2005): 115–126.

³ Adil Khan Miankhel, Kaliappa Kalirajan, dan Shandre M. Thangavelu, "Australia's Export Potential: An Exploratory Analysis," *Journal of the Asia Pacific Economy* 19, no. 2 (2014): 230–246.

⁴ "About Free Trade Agreement," Department of Foreign Affairs and Trade, diakses pada 30 Oktober, 2022, <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/ausfta/australia-united-states-fta>.

⁵ Gregory Mccarthy, "Between Centrality and Anxiety : China in Australia," no. March (2019).

tahun 2015 yakni dengan adanya penandatanganan *China-Australia Free Trade Agreement* (ChAFTA).⁶ Melalui ChAFTA, kedua negara telah sepakat untuk membuka akses terhadap pasar masing-masing negara dengan menghapuskan hambatan-hambatan tarif dan non tarif. Sebanyak 96% barang Australia akan dapat masuk ke pasar Tiongkok tanpa harus membayar tarif apapun, dan hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Perdagangan dan Investasi Australia Andrew Robb.⁷ Adapun produk-produk ekspor Australia yang mendapatkan penghapusan tarif dari Tiongkok misalnya seperti produk agrikultur, sumber daya alam dan juga energi. Hal ini membuat Tiongkok menjadi negara tujuan ekspor Australia terbesar saat ini.

Tiongkok merupakan tujuan ekspor terbesar bagi Australia, sebagaimana dibuktikan oleh jumlah total ekspor dari Australia ke Tiongkok setelah adanya kesepakatan perdagangan pada tahun 2015 telah mencapai angka US\$91,3 miliar. Beberapa produk ekspor paling utama dari Australia ke Tiongkok adalah produk pertanian, pertambangan dan pendidikan.⁸ Tingginya permintaan ekspor barang dari Australia ke Tiongkok membuat posisi Australia yang awalnya defisit menjadi surplus. Menurut data statistik perdagangan Australia, pada tahun 2020 Tiongkok telah menyumbang sekitar 31% dari perdagangan Australia dengan jumlah A\$245 miliar.⁹ Jika dibandingkan kerja sama perdagangan dengan negara lain, kerja sama

⁶ Parliament of Australia, "The Proposed Australia-China Free Trade Agreement", diakses pada 30,22, https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Foreign_Affairs_Defence_and_Trade/Completed_inquiries/2004-07/china/report01/c11

⁷ Alica Kizeková, "Taking Stock of Australia's Asymmetrical Relations with China: Interdependence, Tensions, and New Dimensions," *Journal of Contemporary Eastern Asia* 20, no. 2 (2021): 197–209.

⁸ "China Country Brief," Department of Foreign Affairs and Trade, diakses pada 30 Oktober, 2022, <http://www.dfat.gov.au/geo/china/Pages/china-country-brief.aspx>

⁹ Alice Kizeková, "Taking Stock of Australia's Asymmetrical Relations with China: Interdependence, Tensions, and New Dimensions."

perdagangan dengan Tiongkok yang paling menunjukkan hasil yang signifikan. Melalui kerja sama ChAFTA, Tiongkok sekarang menyumbang sekitar sepertiga dari perdagangan Australia dan untuk ekspor Tiongkok saja setara dengan 5,7% dari PDB Australia.¹⁰ Hal tersebut membuat sebagian besar ekonomi dan sektor sumber daya Australia kini bergantung pada akses pasar Tiongkok.

Melihat besarnya potensi pasar Australia di Tiongkok, membuat Australia perlu memperlambat hubungan kerja sama mereka dengan membentuk perjanjian yang lebih mengikat kedua negara. Hal ini dapat terlihat dari upaya kelompok kepentingan Australia dengan menekan Pemerintahan Australia untuk memperbaiki hubungan negaranya dengan Tiongkok dan bahkan merekomendasikan berbagai bentuk kebijakan seperti agenda-agenda pertemuan tingkat tinggi yang harus dilakukan oleh Pemimpin Australia bersama Pemimpin Tiongkok secara berkala. Pertemuan ini bertujuan untuk menyediakan platform bagi para Pemimpin Australia dan Tiongkok untuk mendiskusikan hubungan bilateral mereka.¹¹ Namun tidak jarang dalam agenda pertemuan ini, Pemimpin Tiongkok seringkali tidak menghadiri pertemuan ini karena dianggap tidak terlalu penting bagi Pemerintahan Tiongkok. Meskipun demikian Pemerintah Australia terus mendorong Pemerintah Tiongkok untuk dapat hadir dalam agenda pertemuan tersebut.

Terlepas dari intensitas hubungan erat perdagangan antara Australia dan Tiongkok yang terus meningkat, hubungan politik kedua negara cenderung diliputi masalah. Perbedaan ideologi politik seringkali menjadi pemicu perselisihan

¹⁰ M. Beeson dan J. Wilson, "Coming to Terms with China: Managing Complications in the Sino-Australian Economic Relationship," *Security Challenges* 11, no. 2 (2015): 21–38.

¹¹ Linda Jakobson, "Australia-China Ties: In Search of Political Trust," no. June (2012): 1–11.

Australia dengan Tiongkok, yang mana Tiongkok memiliki ideologi politik komunis sedangkan Australia dengan ideologi politik liberalnya yang cenderung dekat dengan Amerika Serikat.¹² Selain itu, Australia pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Scott John Morrison dari koalisi Liberal seringkali mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dapat membuat hubungan baik antara Tiongkok dan Australia menjadi buruk.¹³ Pada saat pandemi COVID-19, Perdana Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne, justru mengeluarkan pernyataan yang tegas, dalam pernyataannya tersebut Payne meminta *World Health Organization* (WHO) untuk dapat melakukan penyelidikan tuntas terhadap Tiongkok yang diduga sebagai negara asal virus tersebut.¹⁴ Pernyataan tegas Perdana Menteri Luar Negeri Australia ini tentu saja menyulut amarah dari Tiongkok dan pada tahun 2020 membuat hubungan mereka menjadi tegang.

Tidak hanya perbedaan dalam ideologi politik, kedekatan hubungan Australia dengan Amerika Serikat juga menjadi penghambat hubungan Australia dengan Tiongkok. Australia telah menjalin hubungan aliansi yang kuat dengan Amerika Serikat hampir lebih dari 70 tahun yang didasari atas kesamaan nilai-nilai yang dianut.¹⁵ Kehadiran Tiongkok sebagai negara *rising power*, yang mana saat ini Tiongkok terus menunjukkan percepatan pertumbuhan baik dalam bidang ekonomi maupun militer. Hal ini kemudian dianggap oleh Amerika Serikat sebagai pesaing kekuatan hegemoni negaranya, sehingga Amerika Serikat cenderung

¹² Linda Jakobson, *Australia-China Ties: In Search of Political Trust*, 1.

¹³ Allan Behm, "How Good Is the Australia-China Relationship ? Managing Australia's Diplomatic Relationship with China," no. Juni 2020 (n.d.): 1–12.

¹⁴ Allan Behm, *How Good Is the Australia-China Relationship ? Managing Australia's Diplomatic Relationship with China*, 1.

¹⁵ Ron Huisken, "How to Think about Australia's Relationship with China," *Australian Journal of International Affairs* 71, no. 6 (2017): 563–567.

mengajak negara-negara aliansinya untuk dapat bersikap “Anti-Beijing”.¹⁶ Seruan Amerika Serikat ini tidak jarang membuat Australia mengalami dilema dalam menjalin hubungan dagang dengan Tiongkok mengingat perdagangan Australia dengan Tiongkok sejak tahun 2009 menunjukkan surplus perdagangan. Hal ini berbanding terbalik dengan aktivitas perdagangan Australia dengan Amerika Serikat yang justru mengalami defisit bagi perekonomian Australia.¹⁷

Meskipun Australia memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan Tiongkok pada bidang politik dan sering menimbulkan permasalahan di antara kedua negara. Namun, nyatanya hubungan kerja sama perdagangan kedua negara ini tetap mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari kerja sama perdagangan bebas mereka melalui ChAFTA yang telah berhasil mempercepat pertumbuhan ekonomi Australia dan Tiongkok. Berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat bahwa sikap Australia cenderung mempertahankan hubungan perdagangannya dengan Tiongkok meskipun terdapat ketegangan dalam hubungan politik mereka. Oleh karena itu perlu diteliti apa faktor yang mempengaruhi kebijakan Australia dalam meningkatkan kerja sama perdagangan dengan Tiongkok.

¹⁶ Rory Medcalf, “Australia And China: Understanding the Reality Check ,” *Australian Journal of International Affairs* 73, no. 2 (2019): 109–118, <https://doi.org/10.1080/10357718.2018.1538315>.

¹⁷ Malcolm Cook, “Australia and U.S. -China Relations : Bandwagoned and Unbalancing,” *Joint U.S. Korea Academic Studies* 26 (2016): 43–56.

1.2 Rumusan Masalah

Hubungan kerja sama perdagangan bebas Australia dengan Tiongkok telah membawa Tiongkok sebagai mitra dagang utama Australia. Pembentukan perjanjian kerja sama perdagangan bebas *China-Australia Free Trade Agreement* (ChAFTA) pada tahun 2015, telah memperkuat hubungan kerja sama kedua negara. Melalui kerja sama ChAFTA terlihat adanya peningkatan ekspor Australia terhadap Tiongkok, bahkan pasar Tiongkok telah menyumbang sepertiga dari total ekspor Australia. Terlepas dari hubungan dagang, nyatanya Australia dan Tiongkok memiliki hubungan politik yang tidak baik karena adanya perbedaan yang signifikan. Selain itu memburuknya hubungan Tiongkok dengan aliansi terkuat Australia yakni Amerika Serikat juga telah mewarnai bagaimana hubungan Australia dengan Tiongkok, mengingat saat ini Tiongkok hadir sebagai pesaing kekuatan hegemoni Amerika Serikat. Meskipun demikian, perbedaan dan permasalahan-permasalahan yang muncul antara Australia dan Tiongkok tidak membuat kerja sama perdagangan mereka menurun secara signifikan. Pada saat sekarang ini aktor kedua negara berupaya untuk saling membangun kepercayaan dan kerja sama ke arah yang lebih baik lagi mengingat tingginya manfaat yang telah mereka dapatkan dari kerja sama perdagangan. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan kerja sama perdagangan Australia dengan Tiongkok di tengah perbedaan sistem politik dan kuatnya hubungan aliansi Australia dengan Amerika Serikat menarik untuk diteliti.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari paparan latar belakang dan rumusan masalah di atas, lalu pertanyaan dalam penelitian ini adalah apa faktor yang mempengaruhi kebijakan Australia dalam meningkatkan kerja sama perdagangan dengan Tiongkok melalui ChAFTA

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah guna menganalisis faktor yang mempengaruhi kebijakan Australia dalam meningkatkan kerja sama perdagangannya dengan Tiongkok melalui ChAFTA.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Akademis

Melalui penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu tambahan literasi bagi pembaca khususnya mahasiswa Hubungan Internasional dalam memahami faktor yang mempengaruhi kebijakan Australia dalam meningkatkan kerja sama perdagangan Australia dengan Tiongkok.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan referensi oleh Kementerian Perdagangan Indonesia dan pertimbangan mengenai pembuatan kebijakan perdagangan, serta diharapkan juga bisa menjadi tolak ukur dalam memahami keputusan pengambilan kebijakan luar negeri perdagangan suatu negara.

1.6 Studi Pustaka

Pada penelitian ini peneliti merujuk pada artikel-artikel terdahulu yang memiliki topik ataupun tema yang sama dengan judul penelitian ini. Tujuannya agar peneliti mendapat gambaran mengenai masalah yang diangkat serta memperlihatkan adanya ruang kosong yang belum diteliti peneliti sebelumnya.

Penelitian pertama yang ditulis oleh Mark Beeson dan Jeffrey D. Wilson yang berjudul “*Coming to Terms with China: Managing Complications in the Sino-Australian Economic Relationship*”. Dalam artikel ini dijelaskan bagaimana Tiongkok mampu menjadi mitra ekonomi penting bagi Australia meskipun dalam proses perumusan kebijakannya masih banyak mengalami kendala.¹⁸ Australia dan Tiongkok mulai menjalin kerja sama perdagangan mereka pada akhir abad 20 dan saat ini merupakan momen pengaruh dari kerajaan Inggris terhadap Australia mulai berkurang serta pesatnya pertumbuhan industrialisasi pada negara Jepang, Asia Tenggara dan juga Tiongkok. Tiongkok yang menghadapi krisis sumber daya, hal ini dinilai akan dapat mengancam program pembangunan ekonominya. Oleh karena itu, Tiongkok menjadikan Australia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya menjadi pemasok sumber daya utama ke Tiongkok. Hal tersebut tidak terlepas dari posisi Australia sebagai negara yang mapan dan memiliki sektor pertambangan yang sudah menggunakan teknologi maju. Tidak hanya itu, kedekatan geografis juga menjadikan alasan kenapa Tiongkok memilih Australia sebagai pemasok utama sumber daya ke negaranya.

¹⁸ Beeson dan Wilson, *Coming to Terms with China: Managing Complications in the Sino-Australian Economic Relationship*, 21.

Ekspor Australia ke Tiongkok telah membawa Australia dari yang awalnya mengalami defisit menjadi surplus dan pada tahun 2007 Tiongkok telah hadir sebagai mitra dagang nomor satu Australia. Meskipun dalam hal ini terlihat bagaimana pentingnya posisi Tiongkok terhadap negara Australia, nyatanya Australia dalam proses perumusan kebijakan masih banyak mengalami kendala karena adanya kerentanan hubungan kedua negara dalam bidang politik. Kehadiran Tiongkok sebagai pesaing kekuatan ekonomi Amerika Serikat yang merupakan aliansi terkuat Australia mempersulit hubungan Australia dengan Tiongkok. Sehingga, dalam artikel dikatakan bahwa jika Australia menganggap hubungan ekonominya baik dengan Tiongkok maka itu akan berpengaruh terhadap keamanannya, oleh karena itu pembuat kebijakan Australia harus berhati-hati dalam merumuskan setiap kebijakan.

Artikel ini berkontribusi dalam penelitian ini sebagai bahan rujukan dalam memahami bagaimana bentuk hubungan Australia dan Tiongkok terbentuk hingga menjadi tantangan politik sekaligus ekonomi bagi Australia. Selain itu, Artikel ini memiliki perbedaan yang mendasar dengan penelitian ini terutama dalam fokus analisis yaitu cara Australia dalam merumuskan kebijakan negaranya bersama Tiongkok. Sedangkan untuk ini peneliti lebih memfokuskan analisis terhadap faktor yang mempengaruhi kebijakan Australia dalam meningkatkan kerja sama perdagangan dengan Tiongkok melalui ChAFTA.

Kedua, tulisan oleh Amanda Nabilla Nuryadin yang berjudul “*Menakar Kekuatan Politik Australia – Jepang: Studi Kerja sama Bilateral Bidang Ekonomi dan Pertahanan*”. Artikel ini membahas bagaimana hubungan bilateral Australia dan Jepang yang dimulai dengan hubungan perdagangan hingga berdampak

terhadap menguatnya hubungan politik dan diplomasi kedua negara.¹⁹ Australia dan Jepang merupakan dua negara di kawasan Asia Pasifik dan memiliki banyak sekali kesamaan, baik secara geografi, sekutu yang sama yakni Amerika Serikat, dan keinginan untuk dapat menciptakan tatanan demokrasi kawasan sesuai peraturan internasional. Kerja sama Australia dan Jepang pertama kali ditandai dengan perjanjian kerja sama dagang pada tahun 1957. Kerja sama ini didasari oleh keuntungan kedua negara, di mana Jepang membutuhkan sumber daya dan energi dari Australia untuk dapat menunjang pertumbuhan ekonomi negaranya. Sedangkan Australia membutuhkan Jepang sebagai pasar tujuan produk-produk dari negaranya dan juga di sini Jepang berperan sebagai investor di negara Australia.

Melalui kerja sama perdagangan, hubungan Australia dan Jepang semakin diperkuat dengan adanya pembentukan kerja sama lain yakni kerja sama dalam pertahanan pada tahun 2007. Melalui kerja sama ini kedua negara sepakat untuk tetap memperkuat hubungan kerja sama mereka pada bidang lain yang telah lama terjalin. Adanya kebangkitan pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Pasifik membuat kedua negara ini semakin meningkatkan kerja sama mereka agar dapat menjadi negara yang berpengaruh di Asia Pasifik sehingga dapat membendung pengaruh Tiongkok. Namun meskipun dalam prosesnya kerja sama ini memperlihatkan hasil yang menguntungkan bagi kedua negara, masih terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dialami oleh Australia dan Jepang.

¹⁹ Amanda Nabilla Nuryadin, "Menakar Kekuatan Politik Australia – Jepang : Studi Kerja sama Bilateral Bidang Ekonomi Dan Pertahanan Measuring the Political Power of Australia – Japan : Study of Bilateral Cooperation in the Economy and Defense" 2, no. 2 (2020): 149–164.

Tulisan ini berkontribusi dalam penelitian sebagai bahan rujukan bagi penulis dalam melihat bagaimana Australia menjalin atau membentuk hubungan kerja sama perdagangan dengan negara lain. Besarnya pengaruh dari pasar Jepang terhadap pembangunan ekonomi di negara Australia membuat Australia mempertimbangkan hubungan dagang bilateralnya dengan Jepang. Selain itu, artikel ini memiliki perbedaan yang mendasar dengan penelitian ini terutama dalam fokus negara yang dianalisis yaitu negara Jepang, sedangkan penelitian ini menganalisis kerja sama Australia bersama negara Tiongkok.

Penelitian selanjutnya yang menjadi acuan penulis yaitu artikel yang ditulis oleh Chaoying Qi dan James Xiaohe Zhang dengan judul “*The economic impacts of the China-Australia Free Trade Agreement - A general equilibrium analysis*”. Artikel ini menjelaskan bagaimana dampak dari hubungan kerja sama perdagangan bebas Tiongkok dan Australia tidak hanya pada kedua negara tetapi juga dampaknya terhadap perekonomian dunia.²⁰ Pada tahun 2005 melalui Perdana Menteri Australia John Howard dan Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao memulai negosiasi tentang perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang akan dilaksanakan antar kedua negara. Perjanjian perdagangan bebas ini didasari oleh banyaknya manfaat ekonomi yang akan didapatkan oleh kedua negara jika bekerja sama.

Dalam kerja sama perdagangan Australia memiliki hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara di bagian Asia daripada negara-negara Barat. Pada tahun 2013-2014, negara-negara Asia menyumbang sekitar 75% dari ekspor

²⁰ Chaoying Qi dan James Xiaohe Zhang, “The Economic Impacts of the China-Australia Free Trade Agreement - A General Equilibrium Analysis,” *China Economic Review* 47 (2018): 1–11.

barang. Sedangkan negara Eropa, Amerika Serikat dan Selandia Baru hanya menyumbang sekitar 11%. Tiongkok merupakan mitra dagang Australia yang paling penting di mana hubungan dagang kedua negara ini telah tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun belakang. Tiongkok merupakan negara yang memiliki keuntungan yang paling besar dari adanya perjanjian ChAFTA namun hanya secara absolut tidak relatif, tidak hanya itu perundingan kerja sama ChAFTA yang memakan waktu terlalu lama telah memberikan dampak terhadap keberhasilan kerja sama Tiongkok dengan Selandia Baru, dan ketika ChAFTA ini berhasil dijalankan maka akan mempengaruhi kembali struktur perdagangan dunia.

Artikel ini berkontribusi dalam penelitian ini sebagai bahan rujukan untuk melihat keberhasilan kerja sama dagang Australia dan Tiongkok melalui perjanjian kerja sama ChAFTA. Selain itu, artikel ini membantu penulis melihat data-data dari hubungan kerja sama perdagangan Australia dan Tiongkok melalui payung kerja sama ChAFTA. Di sisi lain, terdapat perbedaan yang mendasar artikel dengan penelitian ini terutama fokus analisis artikel ini dengan melihat dampaknya bagi perekonomian dunia, sedangkan penelitian ini hanya memfokuskan kepada dua negara yakni Australia dan Tiongkok.

Penelitian selanjutnya yakni, artikel yang ditulis oleh Nick Bisley dengan judul “*Australia Engagement with China: From fear to greed and back again*”. Artikel ini membahas bagaimana Australia mengelola hubungannya dengan Tiongkok di tengah kekhawatiran tentang ketidakstabilan keamanan Australia.²¹ Tahun 2017 merupakan satu dekade Tiongkok menggantikan Jepang sebagai mitra

²¹ Nick Bisley, “Australia’s Engagement with China: From Fear to Greed and Back Again,” *International Journal* 73, no. 3 (2018): 379–398.

dagang dua arah Australia. Selama sepuluh tahun inilah Australia terlihat mengambil kebijakan yang berpotensi ancaman, yang mana dalam sepuluh tahun tersebut hubungan perdagangannya dengan Tiongkok menunjukkan hasil yang baik, di sisi lain hubungan keamanan strategisnya dengan Amerika Serikat juga semakin erat. Dua hubungan tersebut dilihat oleh sebagian para ahli sebagai bentuk hubungan yang berbeda kepentingan namun sangat berisiko membawa konflik bagi negara Australia. Munculnya Tiongkok sebagai *rising power* tidak hanya mengganggu keseimbangan konvensional, kepentingan ekonomi dan strategis dari negara persemakmuran Inggris ini, namun kebangkitan Tiongkok ini juga merusak tatanan internasional yang lebih luas.

Australia menjadi salah satu negara yang mengkhawatirkan adanya penyebaran komunis yang lebih luas dari kebangkitan Tiongkok ini, meskipun demikian hubungan perdagangan kedua negara ini menunjukkan hasil yang mengejutkan meskipun kedua pemerintah negara ini tidak memiliki hubungan diplomatik yang baik. Pada pertengahan 1960-an, Tiongkok mengkonsumsi sepertiga dari ekspor gandum Australia dan merupakan pasar ekspor terpenting keenam pada dekade tersebut. Bersama partai buruh, hubungan Australia mulai melakukan normalisasi hubungannya bersama Tiongkok dengan cara mulai mengakui Tiongkok dan membuka pandangan internasional yang lebih ke arah *Asia-Sentris*. Meningkatnya hubungan Australia dengan Tiongkok merupakan tantangan bagi negara Canberra ini terutama terkait dengan sekutunya Amerika Serikat.

Pemerintahan Koalisi Australia melihat buruk hubungan dengan Tiongkok dan lebih sering menyuarakan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan sekutunya

Amerika Serikat. Namun hubungan ini mulai berubah ketika terjadinya krisis moneter dunia pasca peristiwa 9/11 Tiongkok tampil dengan baik dalam krisis tersebut, namun di lain sisi sekutu Amerika Serikat berada di keterpurukan. Australia melihat kemampuan Tiongkok bertahan dalam krisis tersebut sebagai peluang untuk dapat bergantung dengan ekonomi negaranya dan mulai meyakini bahwa kebangkitan Tiongkok ini sesuai dengan tatanan internasional yang berlaku. Meskipun demikian saat ini pemerintah Australia terpecah kedalam dua golongan, di mana satu golongan melihat potensi Tiongkok dan ingin terlibat dengan Tiongkok lebih erat lagi sedangkan golongan yang lainnya melihat hal tersebut sebagai bentuk tindakan yang mendukung Tiongkok dan melemahkan pengaruh sekutunya Amerika Serikat. Kedua golongan tersebut tidak jarang menimbulkan permasalahan dan keterlambatan terkait pengeluaran kebijakan terkait hubungan Australia dengan Tiongkok.

Artikel ini memiliki kontribusi dalam penelitian ini sebagai bahan rujukan dalam melihat bagaimana Australia mampu mengelola hubungan baiknya dengan Tiongkok di tengah perbedaan-perbedaan yang mereka miliki. Selain itu, pentingnya pasar Tiongkok bagi perdagangan Australia membuat negara ini sulit untuk memutuskan kerja sama perdagangan yang telah terjalin selama ini. Artikel ini memiliki perbedaan yang mendasar dengan penelitian ini yaitu terkait dengan fokus analisis, yang mana dalam artikel ini lebih kepada menganalisis bagaimana Australia bisa mempertahankan hubungan dengan Tiongkok, sedangkan penelitian ini melihat faktor yang mempengaruhi kebijakan Australia dalam meningkatkan kerja sama perdagangan dengan Tiongkok melalui ChAFTA.

Penelitian selanjutnya ialah artikel yang ditulis oleh Linda Jakobson dengan judul “*Australia-China Ties: In Search of Political Trust*”. Artikel ini membahas bagaimana hubungan politik Australia dan Tiongkok tidak berjalan dengan baik karena kurangnya kepercayaan negara satu sama lain dan disini juga membahas bagaimana seharusnya Australia menjalin hubungan kepercayaan politik dengan Tiongkok.²² Hubungan politik Australia bersama dengan Tiongkok nyatanya kurang berkembang jika dibandingkan dengan hubungan ekonominya. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa Tiongkok yang sedang berkembang baik secara militer maupun ekonomi meningkatkan kekhawatiran, karena kurangnya transparansi Tiongkok dalam proses pembuatan kebijakan sehingga tidak ada yang tahu pasti bagaimana Tiongkok akan menggunakan kekuatannya. Meskipun demikian dalam jurnal ini menyarankan agar Australia harus berusaha lebih lagi dalam membangun hubungan politik dengan Tiongkok, hal ini didasari oleh adanya kepentingan nasional Australia.

Artikel ini memiliki kontribusi dalam penelitian sebagai bahan rujukan untuk melihat bagaimana hubungan politik kedua negara. Selain itu, artikel ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian ini di mana dalam artikel ini lebih menganalisis tentang bagaimana seharusnya Australia membangun hubungan politik dengan Tiongkok. Sedangkan penelitian ini peneliti hendak menjawab faktor yang mempengaruhi kebijakan Australia dalam meningkatkan kerja sama perdagangan dengan Tiongkok melalui ChAFTA.

²² Linda Jakobson, *Australia-China Ties: In Search of Political Trust*, 1.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 *Domestic Sources of Foreign Policy*

Kebijakan luar negeri adalah tindakan atau langkah yang dilakukan oleh otoritas publik suatu negara terkait dengan aktivitas dan interaksinya dengan negara lain. Perkembangan globalisasi telah membuat hubungan antar negara semakin berkembang, sehingga kebijakan luar negeri dapat berperan sebagai strategi untuk sebuah negara. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri disebut sebagai sikap dan tindakan negara dalam mengatasi dan memanfaatkan lingkungan eksternalnya. Adapun definisi kebijakan luar negeri menurut para ahli adalah sebagai sebuah sistem kegiatan yang dirumuskan oleh komunitas untuk mencapai kepentingan nasional negaranya yang kemudian disesuaikan berdasarkan suatu wilayah atau objek yang berada di luar batas teritorial negara tersebut.²³

Foreign policy atau kebijakan luar negeri sendiri adalah sesuatu yang dibentuk dan dilegitimasi oleh aparat negara, yang mana dalam proses pembentukannya kepentingan nasional merupakan faktor utama dalam menganalisis suatu bentuk kebijakan luar negeri negara. Berdasarkan hal ini, aktor-aktor domestik secara aktif berusaha untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri melalui beberapa cara, mulai dari pemberian suntikan keuangan hingga strategi mobilisasi politik dengan tujuan agar dapat mengarahkan pilihan kebijakan yang dibuat oleh negara untuk kepentingan khusus mereka. Agar dapat memahami bagaimana pengaruh domestik pada akhirnya dapat mempengaruhi sebuah kebijakan luar negeri suatu negara, Chris Alden dan Amnon

²³ Chris Alden dan Amnon Aran, *Foreign Policy Analysis, 2nd edition* (London: taylorfrancis.com: 2016). hal 63-86

Aran telah membaginya ke dalam tiga pendekatan dasar yaitu pendekatan struktur domestik, pendekatan strukturalis, dan pendekatan pluralis. Selain itu, Alden dan Amnon juga membahas peran partai politik yang sering terabaikan tetapi penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri.²⁴ Pendekatan-pendekatan tersebut dijelaskan oleh Chris Alden dan Amnon Aran dalam bukunya yang berjudul *Foreign Policy Analysis*.

Berdasarkan pendekatan-pendekatan yang dijelaskan oleh Alden dan Aran, penulis menggunakan pendekatan pluralis dalam mencoba menganalisis faktor yang mempengaruhi kebijakan Australia dalam meningkatkan kerja sama perdagangan dengan Tiongkok melalui ChAFTA. Alasan penulis memilih untuk menggunakan pendekatan pluralis dari semua pendekatan yang ditawarkan oleh Chris Alden dan Amnon Aran adalah berdasarkan kondisi yang terjadi di Australia, yang mana isu kesepakatan kerja sama perdagangan Australia dan Tiongkok telah banyak menarik perhatian masyarakat Australia, sehingga memunculkan kelompok-kelompok kepentingan yang berusaha mempengaruhi kebijakan Pemerintah Australia. Adapun penjelasan Pendekatan pluralis (*Sub-State Societal Actors and Interest*) yaitu pendekatan yang paling banyak diakui untuk menilai peran dan dampak faktor domestik terhadap kebijakan luar negeri. Pendekatan pluralis mencakup aktor sub-negara dan non-negara dalam arena domestik dan upaya mereka untuk mempengaruhi lembaga negara dan proses pengambilan keputusan. Adapun yang menjadi fokus penjelasan pendekatan pluralis terkait aktor sub-negara dan non-negara adalah kelompok kepentingan, opini publik dan media. Karena masalah kebijakan luar negeri mempengaruhi kepentingan material dari

²⁴ Chris Alden dan Amnon Aran, *Foreign Policy Analysis*, 63.

kelompok sosial yang majemuk secara berbeda, kelompok-kelompok ini bersaing dan memobilisasi untuk mendapatkan pengaruh dalam pembuatan keputusan kebijakan politik. Berikut penjelasan terkait yang menjadi fokus penjelasan pendekatan pluralis terkait aktor sub-negara dan non-negara:

1. Kelompok kepentingan

Kelompok kepentingan didefinisikan sebagai asosiasi individu atau organisasi yang atas dasar satu atau lebih kepentingan bersama. Kelompok kepentingan memainkan peran penting sepanjang proses pengambilan keputusan dengan berusaha mempengaruhi hasil kebijakan melalui birokrasi, politisi, pejabat pemerintah dan penduduk, memperingatkan mereka tentang masalah, peluang, dan opsi kebijakan.²⁵ Dengan adanya perkembangan zaman, suatu kelompok kepentingan dan sebuah gerakan semakin berkembang dan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap implementasinya di suatu negara. Pengaruh kelompok kepentingan dalam pembuatan kebijakan bukanlah kegiatan yang korup atau tidak sah, tetapi elemen kunci dari proses pengambilan keputusan. Dalam tuntutan sistem demokrasi, kelompok kepentingan dan gerakan berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Namun, pengaruh kelompok kepentingan yang tidak proporsional dan buram dapat menyebabkan korupsi administratif, pengaruh yang tidak semestinya, dan penguasaan negara, yang

²⁵ Arfan Ashari Saputra, "Kelompok Kepentingan Dan Gerakan Sosial Baru Dalam Proses," no. May (2018): 0–14.

menguntungkan kelompok kepentingan tertentu dengan mengorbankan kepentingan publik.²⁶

Kelompok kepentingan ini kemudian dapat dikelompokkan kembali berdasarkan motivasi mereka, misalnya kelompok kepentingan ekonomi yang termasuk individu korporasi dan organisasi bisnis. Kelompok profesional, termasuk kelompok profesional seperti serikat pekerja dan petani. Kelompok kepentingan umum, termasuk kelompok hak asasi manusia, kelompok lingkungan dan lainnya. Kelompok kepentingan ini dapat secara langsung, atau tidak langsung melalui konsultan/pengacara (yang disebut pelobi profesional) berusaha mempengaruhi tindakan legislatif. Upaya untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan ini dapat dilakukan melalui mekanisme yang berbeda, termasuk komunikasi langsung dengan pejabat pemerintah, partisipasi dalam audiensi publik, menyusun laporan kepada anggota pemerintah mengenai isu kebijakan tertentu, serta melalui komentar media.²⁷

2. Opini Publik

Opini publik merupakan merupakan istilah luas yang mencakup massa, masyarakat yang peduli terhadap isu kebijakan, kelompok kepentingan, dan kelompok lobi. Secara umum, opini publik didefinisikan sebagai sesuatu hal yang merepresentasikan preferensi kolektif masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah dan politik. Pada hakikatnya, proses demokrasi mendorong warga negara untuk membentuk opini tentang

²⁶ Maira Martini, "Influence of Interest Groups on Policy-Making," *U4 expert answer* 335, no. June (2012): 1–9.

²⁷ Maira Martini, *Influence of Interest Groups on Policy-Making*, 1

sejumlah isu. Dalam sistem politik, opini publik seringkali dibentuk oleh lembaga luar seperti sumber media massa, kelompok kepentingan, lembaga atau bahkan pejabat pemerintah.²⁸ Opini publik dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan parameter keputusan kebijakan luar negeri, namun tidak semua isu kebijakan luar negeri bersumber dari opini publik karena tidak semua isu menjadi perhatian oleh publik. Isu yang seringkali menjadi perhatian publik adalah isu ekonomi, perdagangan, perang, dan perdamaian, di mana isu-isu tersebut menjadi penting bagi publik.

3. Media

Pembuatan kebijakan adalah proses politik yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk media. Media memainkan peranan sebagai mediator antara negara dan masyarakat yang mana melalui media masyarakat dapat melihat dan belajar tentang bagaimana kebijakan pemerintah akan mempengaruhi mereka, selain itu pemerintah juga akan mendapatkan umpan balik terkait kebijakan dan program mereka. Media juga dapat mempengaruhi bagaimana publik dan pembuat kebijakan melihat atau berpikir tentang isu-isu tertentu melalui pemilihan beberapa aspek dari realitas yang dirasakan dan membuatnya lebih menonjol dalam teks yang dikomunikasikan. Bagi sebagian besar pengamat, signifikansi media bagi pembuatan kebijakan muncul dari fakta bahwa media membentuk opini publik, sehingga memaksa aktor politik untuk menanggapi isu populer. Salah satu peran dasar media dalam demokrasi liberal adalah untuk

²⁸ Puji Rianto, "Opini Publik, Agenda Setting, dan Kebijakan Publik," *Jurnal Komunikasi*, 2010.

memeriksa secara kritis urusan pemerintah dengan memastikan bahwa pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakatnya.²⁹

Berdasarkan teori ini, penulis hanya akan menganalisis berdasarkan faktor-faktor domestik atau internal yang ada di Australia. Alasan penulis hanya akan menganalisis berdasarkan faktor domestik atau internal karena pada kondisi kerja sama Australia dengan Tiongkok, terutama dalam melihat kebijakan luar negeri Australia terkait perdagangan terhadap Tiongkok terlihat bahwa pengaruh internal yang paling mendominasi dalam mempengaruhi Pemerintah Australia. Selain itu, penulis juga berpendapat bahwa faktor eksternal kurang menarik untuk diteliti khususnya dalam kasus ChAFTA. Hal ini disebabkan karena pengaruh eksternal yang ditimbulkan kurang besar, sehingga peneliti memutuskan untuk hanya menganalisis faktor internal atau domestik yang ada di Australia.

Pendekatan pluralis akan membantu peneliti dalam menganalisis faktor-faktor domestik yang mempengaruhi kebijakan Australia dalam meningkatkan kerja sama perdagangan dengan Tiongkok. Dimulai dengan faktor dari kelompok kepentingan yang ada di Australia. Di sini akan terlihat apakah kelompok kepentingan di Australia menjadi faktor yang mempengaruhi Australia dalam meningkatkan kerja sama perdagangan dengan Tiongkok. Selanjutnya akan dilihat dari opini publik Australia dengan menjelaskan apakah opini publik di Australia menjadi faktor yang mempengaruhi atau menghambat kebijakan Australia dalam meningkatkan hubungan kerja sama perdagangan dengan Tiongkok. Analisis terakhir yaitu media, yang mana media ini nantinya akan menjelaskan mengenai

²⁹ Christian, "The Media Role Policy Making Process", diakses pada 21 Maret, 2023
<http://www.aalep.eu/media%E2%80%99s-role-policymaking-process>

apakah kebijakan Australia dalam meningkatkan hubungan kerja sama perdagangan dengan Tiongkok dipengaruhi oleh media di Australia.

1.8 Metodologi Penelitian

Pada studi hubungan internasional, untuk memperoleh pengetahuan mengenai sebuah fenomena peneliti dapat melakukan serangkaian kegiatan. Serangkaian kegiatan tersebut merupakan sebuah proses, prinsip, atau sebuah prosedur yang disebut dengan metode penelitian.³⁰ Metode penelitian membahas konsep teoritis dari berbagai metode, baik dari segi kelebihan maupun kekurangan dalam suatu karya. Salah satu metode dalam penelitian yaitu metode penelitian kualitatif yang sekarang menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Metode penelitian kualitatif menurut pendapat Sugiyono ialah suatu metode pengambilan data dengan latar atau kondisi alamiah dengan tujuan untuk menafsirkan atau menginterpretasikan sesuatu secara mendalam terutama untuk mendapatkan data yang berupa makna Metode kualitatif melalui kajian pustaka atau studi literatur dipilih untuk dipakai dalam penelitian ini. Data sekunder didapatkan dari berbagai sumber seperti, artikel, berita, jurnal dan buku yang berhubungan dengan kebijakan Australia dalam meningkatkan kerja sama perdagangan dengan Tiongkok melalui ChAFTA.

³⁰ Mochtar Mas'oeed, *"Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi"*, (Pustaka LP3S, 1994), 39.-18.

1.8.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti memakai pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dinilai mampu dalam menganalisis berbagai data guna menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian dengan metode kualitatif merupakan salah satu cara penelitian untuk tujuan menganalisis, menggambarkan, menemukan, dan menyelidiki berbagai perilaku, seseorang, peristiwa gerakan sosial, perubahan suatu kebijakan, ataupun hubungan timbal balik. Sedangkan untuk Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif analisis. Jenis ini dipilih agar peneliti dapat menggambarkan dengan jelas mengenai fenomena meningkatnya kerja sama perdagangan Australia dengan Tiongkok melalui ChAFTA.

1.8.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi dari tahun 2015 sampai 2022. 2015 dijadikan tahun awal penelitian karena merupakan tahun dibentuknya hubungan kerja sama perdagangan bebas *China-Australia Free Trade Agreement (ChAFTA)*. Sementara tahun 2022 akan penulis jadikan sebagai tahun akhir penelitian di mana pada tahun ini masih terdapat peningkatan kerja sama perdagangan Australia dan Tiongkok sehingga data-data yang digunakan masih relevan.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan objek yang perilakunya akan dideskripsikan, dijelaskan dan diramalkan sebagai akibat dari suatu fenomena itu dapat terjadi.³¹ Unit analisis pada penelitian ini adalah faktor Australia dalam meningkatkan kerja sama perdagangan dengan Tiongkok. Unit eksplanasi merupakan objek yang

³¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Edisi Ke-2, (Jakarta, Kencana, 2007), 68.

mempengaruhi perilaku unit analisis yang akan digunakan.³² Adapun unit eksplanasi penelitian ini adalah peningkatan kerja sama perdagangan Australia dengan Tiongkok. Selain Unit analisis dan unit eksplanasi, pada penelitian ini juga terdapat level analisis. Level analisis merupakan tingkatan objek yang menjadi fokus utama dalam pembahasan sebuah penelitian.³³ Level analisis dalam penelitian ini berada pada tingkat negara, karena melihat bagaimana dinamika struktur domestik Australia dalam mempengaruhi kebijakan luar negerinya terkhusus pada kebijakan perdagangan.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data untuk penelitian ini, peneliti menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian.³⁴ Teknik pengumpulan data yang dilakukan bisa didapatkan dari pengumpulan dokumen serta tulisan-tulisan ilmiah baik itu dalam bentuk jurnal, buku, dokumen, situs terpercaya serta sumber lainnya yang menunjang data-data terkait dengan kebijakan Australia dalam meningkatkan kerja sama perdagangan dengan Tiongkok melalui ChAFTA. Sumber-sumber yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut.

Pertama, data dan informasi terkait dengan hubungan kerja sama Australia dan Tiongkok diperoleh melalui situs *website* resmi Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, guna mendapatkan data terkait dengan info perdagangan

³² Akbar, Purnomo S. Dan Usman, “Metode Penelitian Sosial”, Jakarta: Bumi Aksara, 2006. Hal: 42.

³³ Mochtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, 39.

³⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Edisi 2, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Australia dengan Tiongkok melalui link www.dfat.gov.au/ dan situs website resmi penyedia data CEIC guna mendapatkan data terkait dengan neraca perdagangan Australia dengan Tiongkok melalui link www.ceicdata.com.id/. Selanjutnya data dan informasi juga didapatkan melalui melalui artikel jurnal, seperti artikel yang ditulis oleh Mark Beeson dan Jeffrey D. Wilson yang berjudul “*Coming to Terms with China: Managing Complications in the Sino-Australia Economic Relationship*”, kemudian juga menggunakan artikel yang ditulis oleh oleh Chaoying Qi dan James Xiaohu Zhang dengan judul “*The economic impacts of the China-Australia Free Trade Agreement - A general equilibrium analysis*”, dan juga menggunakan artikel yang ditulis oleh Nick Bisley dengan judul “*Australia Engagement with China: From fear to greed and back again*”. Terakhir penulis juga menggunakan situs berita online yang didapat dari www.cnnindonesia.com/, www.cnbcindonesia.com/, dan news.kompas.com/. Situs berita online ini digunakan penulis sebagai sumber berita terbaru yang memberikan lebih banyak data terkait penelitian ini.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Berdasarkan buku yang ditulis oleh Matthew dan Huberman, teknik analisis data dilakukan melalui tiga cara yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing and verification*.³⁵

1) Data Reduction

Data reduction mengacu pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan/atau mengubah data yang yang didapatkan

³⁵ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis s A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (London: SAGE, 2014)

melalui transkrip, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan beberapa bahan bacaan yang sesuai dengan topik yang diangkat yaitu peningkatan kerja sama perdagangan Australia dengan Tiongkok melalui ChAFTA. Data-data yang digunakan dipilih melalui pencarian di media internet dengan kata kunci, *Australia-China Free Trade Agreement, Australia and China Relations*, kondisi ekonomi Australia dan ChAFTA. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian difokuskan berdasarkan kebutuhan untuk penelitian guna memudahkan penulis dalam menggunakan data yang akan diteliti.

2) *Data Display*

Setelah data dikumpulkan, diorganisasikan, dan dikategorikan dengan cara yang mudah dipahami, langkah selanjutnya adalah menampilkan atau menyajikan data, hal ini memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Data yang sebelumnya telah dikondensasi akan penulis paparkan dalam bentuk kalimat penelitian yang sistematis dan mudah dipahami. Dalam tahapan ini penulis nantinya akan menyajikan data dalam bentuk teks naratif yang sifatnya deskriptif yang terlihat dari pemaparan BAB I hingga BAB IV yang membahas tentang faktor yang mempengaruhi kebijakan Australia dalam meningkatkan kerja sama perdagangan dengan Tiongkok melalui ChAFTA.

3) *Conclusion Drawing and Verification*

Setelah semua data berhasil dikumpulkan mulai dari data penting hingga data tambahan lainnya, data dan informasi kemudian dianalisis menggunakan kerangka konsep yang dipilih untuk mendapatkan jawaban dan kesimpulan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, dengan adanya pengumpulan dan pengorganisasian data menjadikan penulis lebih mudah dalam memahami dan menyimpulkan data

terkait faktor yang mempengaruhi kebijakan Australia dalam meningkatkan kerja sama perdagangan dengan Tiongkok melalui ChAFTA, sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan yang valid.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab pertama ini dimulai dengan pembahasan pada latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan studi pustaka, penjelasan kerangka konsep yang digunakan, batasan masalah unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar kerja peneliti dan gambaran secara keseluruhan, guna memberikan informasi mendasar kepada pembaca mengenai penelitian ini.

BAB II: Kebijakan Luar Negeri Australia ke Tiongkok

Pada bab ini menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk kebijakan Luar Negeri Australia terhadap Tiongkok dengan memfokuskan pada tiga periode dari Perdana Menteri Australia. Dilanjutkan dengan penjelasan bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap hubungan dagang Australia dan Tiongkok.

BAB III: Hubungan dagang Australia dan Tiongkok

Pada bab ini penulis akan memaparkan hubungan dagang Australia dan Tiongkok. Mengulas kembali tentang bagaimana proses awal mula kedua negara membentuk hubungan dan hubungan ini pada akhirnya menjadi luas hingga ke hubungan perdagangan. Dilanjutkan dengan penjelasan kesepakatan kerja sama perdagangan kedua negara dengan membentuk *China-Australia Free Trade*

Agreement tahun 2015 hingga pembahasan terkait kondisi terkini dari hubungan perdagangan kedua negara.

BAB IV: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Australia dalam Meningkatkan dengan Tiongkok pada Tahun 2015-2022

Bab IV ini membahas tentang analisis kebijakan peningkatan kerjasama Australia dengan Tiongkok dengan menggunakan kerangka konsep yang dipilih peneliti untuk menjelaskan alasan kebijakan peningkatan kerjasama tersebut. Peneliti menjabarkan analisis melalui satu pendekatan yaitu pendekatan pluralis, pendekatan ini akan menjabarkan pengaruh kondisi domestik Australia dalam menjalin kerja sama dengan Tiongkok.

BAB V: Penutup

Bab terakhir dari penelitian ini disebut Bab V, yang berisi temuan dan kesimpulan dari semua gambaran yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Selain itu, peneliti juga menyertakan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya, agar peneliti tersebut dapat melanjutkan penelitian ini dengan cara yang lebih efektif.

